

**DAFTAR INFORMASI YANG DI KECUALIKAN
DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN
TAHUN 2024**

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 H Undang-undang No. 14 2008 tentang KIP	Dinas Perdagangan	Selama Undang-undang berlaku	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi Data Pribadi Pegawai
2	Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah	Dinas Perdagangan	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat	Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian
3	SPJ, SPM, SPP dan SP2D	UU No. 8/1974 tentang Keuangan Negara UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan	Dinas Perdagangan	Masa pelaksanaan pekerjaan	Mengungkapkan data	Menjaga kerahasiaan pembelanjaan
4	Rincian anggaran kegiatan	Permendagri No. 52 tahun 2015; Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2018	Dinas Perdagangan	Selama tahun anggaran berjalan	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat
5	Penataan Kinerja Pegawai	Peraturan No. 23 Tahun 2007	Dinas Perdagangan	Selama periode berjalan	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai
6	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah	Dinas Perdagangan	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	Penetapan nilai pengadaan yang akurat



Madiun, 19 Januari 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN

Ansar Rasidi, S.Sos, M.Si
NIP 1972051019920110